



BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG PENETAPAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 116 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa;
- b. bahwa dengan adanya perubahan beberapa nama Desa di Kabupaten Malang, maka Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa perlu untuk disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 1 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG
dan
BUPATI MALANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG
PENETAPAN DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 2 Seri D) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Penetapan dan Penegasan Batas Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan dan Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Batas dan Luas Wilayah Desa yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap diakui keberadaannya sebagai Batas dan Luas Wilayah Desa, sepanjang belum ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

3. Diantara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB IIIA, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IIIA
KETENTUAN PERALIHAN

4. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 5A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

Perubahan penyebutan nama Desa dalam administrasi kependudukan yang diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, dilakukan penyesuaian secara bertahap paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

5. Ketentuan dalam Lampiran diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kapanjen
pada tanggal 30 Januari 2026

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

Diundangkan di Kapanjen
pada tanggal 30 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG

ttd.

BUDIAR

Lembaran Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2026 Nomor 2 Seri D

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 8-2/2026

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG PENETAPAN DESA

I. UMUM

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa merupakan dasar hukum yang mengatur keberadaan dan penetapan desa di wilayah Kabupaten Malang. Seiring berjalannya waktu, terdapat beberapa perubahan nama desa yang perlu disesuaikan dengan kondisi aktual dan kesepakatan masyarakat setempat. Perubahan nama desa ini didasarkan pada surat pernyataan dari kepala desa yang bersangkutan, yang menunjukkan adanya kebutuhan untuk menyesuaikan penulisan nama desa agar lebih tepat dan sesuai dengan kaidah penulisan yang benar.

Perubahan nama desa ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki implikasi hukum yang signifikan, terutama dalam hal dokumen resmi, batas wilayah, dan hak-hak administratif lainnya.

Berdasarkan hasil pencermatan nama Desa dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa, terdapat beberapa perubahan nama Desa di Kabupaten Malang sebanyak 7 (tujuh) Desa yakni:

- a. Desa Sumbermanjingkulon Kecamatan Pagak;
- b. Desa Pringgodani Kecamatan Bantur;
- c. Desa Gedogkulon Kecamatan Turen;
- d. Desa Gedogwetan Kecamatan Turen;
- e. Desa Ngebruk Kecamatan Sumberpucung;
- f. Desa Bunutwetan Kecamatan Pakis; dan
- g. Desa Langlang Kecamatan Singosari.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
 NOMOR 2 TAHUN 2026
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
 NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG
 PENETAPAN DESA

PENETAPAN NAMA DESA DI KABUPATEN MALANG

NO	DESA	KECAMATAN
1	2	3
1	TULUNGREJO	DONOMULYO
2	BANJAREJO	DONOMULYO
3	KEDUNGSALAM	DONOMULYO
4	TLOGOSARI	DONOMULYO
5	TEMPURSARI	DONOMULYO
6	DONOMULYO	DONOMULYO
7	PURWOREJO	DONOMULYO
8	SUMBEROTO	DONOMULYO
9	MENTARAMAN	DONOMULYO
10	PURWODADI	DONOMULYO
11	SUMBERMANJINGKULON	PAGAK
12	PANDANREJO	PAGAK
13	SUMBERKERTO	PAGAK
14	SEMPOL	PAGAK
15	PAGAK	PAGAK
16	TLOGOREJO	PAGAK
17	GAMPINGAN	PAGAK
18	SUMBEREJO	PAGAK
19	WONOKERTO	BANTUR
20	REJOSARI	BANTUR
21	BANTUR	BANTUR
22	WONOREJO	BANTUR
23	SRIGONCO	BANTUR
24	SUMBERBENING	BANTUR
25	BANDUNGREJO	BANTUR
26	PRINGGODANI	BANTUR
27	REJOYOSO	BANTUR
28	KARANGSARI	BANTUR

1	2	3
29	TAMBAKASRI	SUMBERMANJING WETAN
30	TEGALREJO	SUMBERMANJING WETAN
31	SEKARBANYU	SUMBERMANJING WETAN
32	KLEPU	SUMBERMANJING WETAN
33	RINGINKEMBAR	SUMBERMANJING WETAN
34	KEDUNGBANTENG	SUMBERMANJING WETAN
35	SITIARJO	SUMBERMANJING WETAN
36	SUMBERAGUNG	SUMBERMANJING WETAN
37	ARGOTIRTO	SUMBERMANJING WETAN
38	HARJOKUNCARAN	SUMBERMANJING WETAN
39	SUMBERMANJING WETAN	SUMBERMANJING WETAN
40	RINGINSARI	SUMBERMANJING WETAN
41	DRUJU	SUMBERMANJING WETAN
42	TAMBAKREJO	SUMBERMANJING WETAN
43	SIDOASRI	SUMBERMANJING WETAN
44	SUKODONO	DAMPIT
45	SUMBERSUKO	DAMPIT
46	SRIMULYO	DAMPIT
47	BATURETNO	DAMPIT
48	BUMIREJO	DAMPIT
49	AMADANOM	DAMPIT
50	PAMOTAN	DAMPIT
51	MAJANGTENGAH	DAMPIT
52	REMBUN	DAMPIT
53	POJOK	DAMPIT
54	JAMBANGAN	DAMPIT
55	LEBAKHARJO	AMPELGADING
56	WIROTAMAN	AMPELGADING
57	TAMANASRI	AMPELGADING
58	TIRTOMARTO	AMPELGADING
59	PURWOHARJO	AMPELGADING
60	SIDORENGGO	AMPELGADING
61	TIRTOMOYO	AMPELGADING
62	ARGOYUWONO	AMPELGADING
63	MULYOASRI	AMPELGADING
64	TAWANGAGUNG	AMPELGADING
65	SIMOJAYAN	AMPELGADING

1	2	3
66	TAMANSARI	AMPELGADING
67	SONOWANGI	AMPELGADING
68	DAWUHAN	PONCOKUSUMO
69	SUMBEREJO	PONCOKUSUMO
70	PANDANSARI	PONCOKUSUMO
71	NGADIRESO	PONCOKUSUMO
72	WONOREJO	PONCOKUSUMO
73	KARANGNONGKO	PONCOKUSUMO
74	KARANGANYAR	PONCOKUSUMO
75	JAMBESARI	PONCOKUSUMO
76	NGEBRUK	PONCOKUSUMO
77	PAJARAN	PONCOKUSUMO
78	ARGOSUKO	PONCOKUSUMO
79	WONOMULYO	PONCOKUSUMO
80	BELUNG	PONCOKUSUMO
81	WRINGINANOM	PONCOKUSUMO
82	PONCOKUSUMO	PONCOKUSUMO
83	GUBUGKLAKAH	PONCOKUSUMO
84	NGADAS	PONCOKUSUMO
85	SUMBERPUTIH	WAJAK
86	WONOAYU	WAJAK
87	BAMBANG	WAJAK
88	BRINGIN	WAJAK
89	DADAPAN	WAJAK
90	PATOKPICIS	WAJAK
91	BLAYU	WAJAK
92	CODO	WAJAK
93	SUKOLILO	WAJAK
94	KIDANGBANG	WAJAK
95	SUKOANYAR	WAJAK
96	WAJAK	WAJAK
97	NGEMBAL	WAJAK
98	TAWANGREJENI	TUREN
99	KEMULAN	TUREN
100	SAWAHAN	TUREN
101	UNDAAN	TUREN
102	GEDOGKULON	TUREN

1	2	3
103	GEDOGWETAN	TUREN
104	TALOK	TUREN
105	TANGGUNG	TUREN
106	JERU	TUREN
107	PAGEDANGAN	TUREN
108	SANANKERTO	TUREN
109	SANANREJO	TUREN
110	KEDOK	TUREN
111	TALANGSUKO	TUREN
112	TUMPUKRENTENG	TUREN
113	PUTAT KIDUL	GONDANGLEGI
114	GONDANGLEGI KULON	GONDANGLEGI
115	SUKOSARI	GONDANGLEGI
116	GONDANGLEGI WETAN	GONDANGLEGI
117	SUKOREJO	GONDANGLEGI
118	BULUPITU	GONDANGLEGI
119	PANGGUNGREJO	GONDANGLEGI
120	GANJARAN	GONDANGLEGI
121	PUTAT LOR	GONDANGLEGI
122	UREK-UREK	GONDANGLEGI
123	KETAWANG	GONDANGLEGI
124	PUTUKREJO	GONDANGLEGI
125	SUMBERJAYA	GONDANGLEGI
126	SEPANJANG	GONDANGLEGI
127	PUTUKREJO	KALIPARE
128	KALIPARE	KALIPARE
129	SUMBERPETUNG	KALIPARE
130	SUKOWILANGUN	KALIPARE
131	TUMPAKREJO	KALIPARE
132	ARJOSARI	KALIPARE
133	KALIREJO	KALIPARE
134	ARJOWILANGUN	KALIPARE
135	KALIASRI	KALIPARE
136	TERNYANG	SUMBERPUCUNG
137	SENGGRENG	SUMBERPUCUNG
138	SAMBIGEDE	SUMBERPUCUNG
139	NGEBRUK	SUMBERPUCUNG

1	2	3
140	JATIGUWI	SUMBERPUCUNG
141	SUMBERPUCUNG	SUMBERPUCUNG
142	KARANGKATES	SUMBERPUCUNG
143	KEMIRI	KEPANJEN
144	SENGGURUH	KEPANJEN
145	MANGUNREJO	KEPANJEN
146	JENGGOLO	KEPANJEN
147	KEDUNGPEDARINGAN	KEPANJEN
148	TEGALSARI	KEPANJEN
149	PANGGUNGREJO	KEPANJEN
150	TALANGAGUNG	KEPANJEN
151	DILEM	KEPANJEN
152	SUKORAHARJO	KEPANJEN
153	CURUNGREJO	KEPANJEN
154	JATIREJOYOSO	KEPANJEN
155	NGADILANGKUNG	KEPANJEN
156	MOJOSARI	KEPANJEN
157	SUDIMORO	BULULAWANG
158	KASRI	BULULAWANG
159	BAKALAN	BULULAWANG
160	KREBET	BULULAWANG
161	GADING	BULULAWANG
162	SUKONOLO	BULULAWANG
163	LUMBANGSARI	BULULAWANG
164	WANDANPURO	BULULAWANG
165	SEMPALWADAK	BULULAWANG
166	BULULAWANG	BULULAWANG
167	KREBET SENGGRONG	BULULAWANG
168	KUWOLU	BULULAWANG
169	KASEMBON	BULULAWANG
170	PRINGU	BULULAWANG
171	GUNUNGSARI	TAJINAN
172	GUNUNGRONGGO	TAJINAN
173	PURWOSEKAR	TAJINAN
174	NGAWONGGO	TAJINAN
175	PANDANMULYO	TAJINAN
176	JATISARI	TAJINAN

1	2	3
177	TAJINAN	TAJINAN
178	RANDUGADING	TAJINAN
179	JAMBEARJO	TAJINAN
180	TANGKILSARI	TAJINAN
181	SUMBERSUKO	TAJINAN
182	TAMBAKASRI	TAJINAN
183	NGINGIT	TUMPANG
184	KIDAL	TUMPANG
185	KAMBINGAN	TUMPANG
186	PANDANAJENG	TUMPANG
187	PULUNGOWO	TUMPANG
188	BOKOR	TUMPANG
189	SLAMET	TUMPANG
190	WRINGINSONGO	TUMPANG
191	JERU	TUMPANG
192	MALANGSUKO	TUMPANG
193	TUMPANG	TUMPANG
194	TULUSBESAR	TUMPANG
195	DUWET	TUMPANG
196	BENJOR	TUMPANG
197	DUWET KRAJAN	TUMPANG
198	TAJI	JABUNG
199	NGADIREJO	JABUNG
200	KENONGO	JABUNG
201	SIDOREJO	JABUNG
202	SUKOPURO	JABUNG
203	PANDANSARI LOR	JABUNG
204	SIDOMULYO	JABUNG
205	GADINGKEMBAR	JABUNG
206	ARGOSARI	JABUNG
207	KEMANTREN	JABUNG
208	SUKOLILO	JABUNG
209	GUNUNGJATI	JABUNG
210	JABUNG	JABUNG
211	SLAMPAREJO	JABUNG
212	KEMIRI	JABUNG
213	KEDUNGREJO	PAKIS

1	2	3
214	BANJAREJO	PAKIS
215	PUCANGSONGO	PAKIS
216	SUKOANYAR	PAKIS
217	SUMBERPASIR	PAKIS
218	PAKISKEMBAR	PAKIS
219	SUMBERKRADENAN	PAKIS
220	AMPELDENTO	PAKIS
221	SEKARPURO	PAKIS
222	MANGLIAWAN	PAKIS
223	TIRTOMOYO	PAKIS
224	SAPTORENGGO	PAKIS
225	ASRIKATON	PAKIS
226	BUNUTWETAN	PAKIS
227	PAKISJAJAR	PAKIS
228	PERMANU	PAKISAJI
229	KARANGPANDAN	PAKISAJI
230	GLANGGANG	PAKISAJI
231	WONOKERSO	PAKISAJI
232	KARANGDUREN	PAKISAJI
233	SUTOJAYAN	PAKISAJI
234	PAKISAJI	PAKISAJI
235	JATISARI	PAKISAJI
236	WADUNG	PAKISAJI
237	GENENGAN	PAKISAJI
238	KENDALPAYAK	PAKISAJI
239	KEBONAGUNG	PAKISAJI
240	NGAJUM	NGAJUM
241	PALAN	NGAJUM
242	NGASEM	NGAJUM
243	BANJARSARI	NGAJUM
244	KRANGGAN	NGAJUM
245	KESAMBEN	NGAJUM
246	BABADAN	NGAJUM
247	BALESARI	NGAJUM
248	MAGUAN	NGAJUM
249	SUMBERSUKO	WAGIR
250	MENDALANWANGI	WAGIR

1	2	3
251	SITIREJO	WAGIR
252	PARANGARGO	WAGIR
253	GONDOWANGI	WAGIR
254	PANDANREJO	WAGIR
255	PETUNGSEWU	WAGIR
256	SUKODADI	WAGIR
257	SIDORAHAYU	WAGIR
258	JEDONG	WAGIR
259	DALISODO	WAGIR
260	PANDANLANDUNG	WAGIR
261	KUCUR	DAU
262	KALISONGO	DAU
263	KARANGWIDORO	DAU
264	PETUNGSEWU	DAU
265	SELOREJO	DAU
266	TEGALWERU	DAU
267	LANDUNGSARI	DAU
268	MULYOAGUNG	DAU
269	GADINGKULON	DAU
270	SUMBERSEKAR	DAU
271	TEGALGONDO	KARANGPLOSO
272	KEPUHARJO	KARANGPLOSO
273	NGENEP	KARANGPLOSO
274	NGIJO	KARANGPLOSO
275	AMPELDENTO	KARANGPLOSO
276	GIRIMOYO	KARANGPLOSO
277	BOCEK	KARANGPLOSO
278	DONOWARIH	KARANGPLOSO
279	TAWANGARGO	KARANGPLOSO
280	WONOREJO	SINGOSARI
281	DENGKOL	SINGOSARI
282	BATURETNO	SINGOSARI
283	WATUGEDE	SINGOSARI
284	BANJARARUM	SINGOSARI
285	TUNJUNGTIRTO	SINGOSARI
286	LANGLANG	SINGOSARI
287	PURWOASRI	SINGOSARI

1	2	3
288	KLAMPOK	SINGOSARI
289	GUNUNGREJO	SINGOSARI
290	TAMANHARJO	SINGOSARI
291	ARDIMULYO	SINGOSARI
292	TOYOMARTO	SINGOSARI
293	RANDUAGUNG	SINGOSARI
294	SIDOLUHUR	LAWANG
295	SRIGADING	LAWANG
296	SIDODADI	LAWANG
297	BEDALI	LAWANG
298	MULYOARJO	LAWANG
299	SUMBERNGEPOH	LAWANG
300	SUMBERPORONG	LAWANG
301	TURIREJO	LAWANG
302	KETINDAN	LAWANG
303	WONOREJO	LAWANG
304	BENDOSARI	PUJON
305	SUKOMULYO	PUJON
306	PUJON KIDUL	PUJON
307	PANDESARI	PUJON
308	PUJON LOR	PUJON
309	NGROTO	PUJON
310	NGABAB	PUJON
311	TAWANGSARI	PUJON
312	MADIREDO	PUJON
313	WIYUREJO	PUJON
314	PAGERSARI	NGANTANG
315	SIDODADI	NGANTANG
316	BANJAREJO	NGANTANG
317	PURWOREJO	NGANTANG
318	NGANTRU	NGANTANG
319	BANTUREJO	NGANTANG
320	PANDANSARI	NGANTANG
321	MULYOREJO	NGANTANG
322	SUMBERAGUNG	NGANTANG
323	KAUMREJO	NGANTANG
324	TULUNGREJO	NGANTANG

1	2	3
325	WATUREJO	NGANTANG
326	JOMBOK	NGANTANG
327	PONDOKAGUNG	KASEMBON
328	BAYEM	KASEMBON
329	PAIT	KASEMBON
330	WONOAGUNG	KASEMBON
331	KASEMBON	KASEMBON
332	SUKOSARI	KASEMBON
333	SIDODADI	GEDANGAN
334	GAJAHREJO	GEDANGAN
335	SINDUREJO	GEDANGAN
336	GEDANGAN	GEDANGAN
337	SEGARAN	GEDANGAN
338	SUMBEREJO	GEDANGAN
339	TUMPAKREJO	GEDANGAN
340	GIRIMULYO	GEDANGAN
341	PUJIHARJO	TIRTOYUDO
342	SUMBERTANGKIL	TIRTOYUDO
343	KEPATIHAN	TIRTOYUDO
344	JOGOMULYAN	TIRTOYUDO
345	TLOGOSARI	TIRTOYUDO
346	TIRTOYUDO	TIRTOYUDO
347	SUKOREJO	TIRTOYUDO
348	AMPELGADING	TIRTOYUDO
349	TAMANKUNCARAN	TIRTOYUDO
350	GADUNGSARI	TIRTOYUDO
351	WONOAGUNG	TIRTOYUDO
352	TAMANSATRIYAN	TIRTOYUDO
353	PURWODADI	TIRTOYUDO
354	SLOROK	KROMENGAN
355	JATIKERTO	KROMENGAN
356	NGADIREJO	KROMENGAN
357	KROMENGAN	KROMENGAN
358	PENIWEN	KROMENGAN
359	JAMBUWER	KROMENGAN
360	KARANGREJO	KROMENGAN
361	KLUWUT	WONOSARI

1	2	3
362	PLANDI	WONOSARI
363	PLAOSAN	WONOSARI
364	KEBOBANG	WONOSARI
365	SUMBERTEMPUR	WONOSARI
366	SUMBERDEM	WONOSARI
367	WONOSARI	WONOSARI
368	BANGELAN	WONOSARI
369	CLUMPRIT	PAGELARAN
370	SUWARU	PAGELARAN
371	KADEMANGAN	PAGELARAN
372	BALEARJO	PAGELARAN
373	KANIGORO	PAGELARAN
374	BRONGKAL	PAGELARAN
375	PAGELARAN	PAGELARAN
376	BANJAREJO	PAGELARAN
377	KARANGSUKO	PAGELARAN
378	SIDOREJO	PAGELARAN

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI